



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019**

**KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA YOGYAKARTA
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2019.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2019 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2018 dan didasarkan pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019. Dengan adanya kelembagaan baru di tahun 2017 serta Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta di tahun 2017, maka penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana jika sebelumnya Kantor Kesatuan Bangsa mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan urusan kepemudaan dan olahraga maka mulai tahun 2017 dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta maka Kantor Kesatuan Bangsa pecah menjadi dua Perangkat Daerah (PD) yaitu Kantor Kesatuan Bangsa yang mengampu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan Dinas Pemuda dan Olah Raga yang mengampu urusan kepemudaan dan keolahragaan. Meskipun demikian untuk Kantor Kesatuan Bangsa belum memiliki aturan hukum baru sehingga landasan hukumnya masih menggunakan landasan hukum yang lama.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RENJA-PD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2017 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 5 (lima) program yang diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Pencapaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 pada lampiran.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Kota Yogyakarta

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

1	2	3	4	5	6	Target Dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						13	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		16
						Target Renja PD tahun 2017		Realisasi Renja PD tahun 2017		Tingkat Realisasi %			14	15	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
2.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														
2.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa														
2.19.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	-	100%	100%	100%	331.552.342,00	100%	304.093.806,04	100%	91,73%	100%	100%	100%	
2.19.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1. Makan dan minum yang tersedia untuk - Koordinasi - Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	-	100%	100%	50 orang 35 orang	113.690.000,00	50 orang 35 orang 15 dokumen	109.148.795,48	100%	96,01%	48 kali 24 kali	48 kali 24 kali	100%	

	2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					15 dokumen						15 dokumen	15 dokumen		
2.19.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Materai 600 yang tersedia 2. Materai 3000 yang tersedia 3. STNK Roda 4 yang terbayar 4. STNK Roda 2 yang terbayar 5. Bahan dan peralatan kebersihan 6. Jasa kebersihan kantor 7. Alat tulis kantor yang tersedia 8. Jasa pencetakan 9. Jasa penggandaan 10. Komponen instalasi listrik /	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik				75 lembar 250 lembar 2 unit 2 unit 12 jenis 1 orang 56 jenis 1 jenis 75.000 lembar 4 jenis	159.753.670,00	75 lembar 250 lembar 2 unit 2 unit 12 jenis 1 orang 56 jenis 1 jenis 75.000 lembar 4 jenis	136.866.340,00	100%	85,67%	75 lembar 250 lembar 2 unit 3 unit 21 jenis 1 orang 41 jenis 10 jenis 100.000 lembar 3 jenis	75 lembar 250 lembar 2 unit 3 unit 21 jenis 1 orang 41 jenis 10 jenis 100.000 lembar 3 jenis	100%	

	<p>penerangan bangunan kantor yang tersedia</p> <p>11. Komponen printer yang tersedia</p> <p>12. Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia</p> <p>13. Komponen peralatan dan pengkapann kantor / rumah tangga tersedia</p> <p>14. Peraturan perundang-undangan yang tersedia</p> <p>15. Jasa perbaikan peralatan kerja</p> <p>16. Jasaeliharaan peralatan kerja</p> <p>17. Pmeliharaan Taman</p>					2 jenis		2 jenis			8 jenis	8 jenis		
											2 jenis	2 jenis		
											13 jenis	13 jenis		
						5 buah		5 buah			3 buah	3 buah		
						9 jenis		9 jenis						
						1 paket		1 paket			12 jenis	12 jenis		
											1 kali	1 kali		
2.19.01.001.020	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan	Terwujudnya pelayanan administrasi	-	100%	100%		58.078.672,00		58.078.670,04	100%	100%			100%

	Perkantoran 1. Dokumen administrasi pnatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan) 2. Akuntansi yang tersusun 3. Dokumentasi administrasi kepegawaian yang dikelola 4. Jasa tenaga bantuan	perkantoran dengan baik				4 dokumen 4 dokumen 1 orang		4 dokumen 4 dokumen 1 orang				4 jenis 22 dokumen 1 orang	4 jenis 22 dokumen 1 orang		
2.19.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100%	100%	100%	62.585.000,00	100%	45.824.349,00	100%	73,22%	100%	100%	100%	
2.19.01.002.022	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung / Bangunan / kantor 1. Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	-	100%	100%	1 unit	25.000.000,00	1 unit	18.642.000,00 0	100%	74,57%	1 unit	1 unit	100%	
2.19.01.002.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	-	100%	100%		37.585.000,00		27.182.348,00	100%	72,32%			100%	

	1. Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Roda 4 - Roda 2					2 buah 2 buah		2 buah 2 buah				2 unit 3 unit	2 unit 3 unit		
2.19.01.005	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	-	100%	100%	100%	8.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	87,50%	100%	100%	100%	
2.19.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Diklat Formal	SDM aparatur meningkat	-	100%	100%		8.000.000,00		7.000.000,00	100%	87,50%			100%	
						4 paket		4 paket				2 paket	2 paket		
2.19.01.006	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	-	100%	100%	100%	12.650.000,00	100%	12.650.000,00	100%	100%				
2.19.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja 1. Dokumen perencanaan,	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Meningkat	-	100%	100%		12.650.000,00		12.650.000,00	100%	100%				
						5 buah		5 buah							

	pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA) 2. Laporan Konerja PD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)					5 buah		5 buah							
2.19.01.090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Presentase organisasi ber-SKT yang aktif		79%	79%		697.344.664,00	100%	659.482.323,72	100%	94,57%				
2.19.01.090.001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspaan Nasional 1. Sosialisasi cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat 3. Pemantapan rasa nasionalisme bagi pemuda dan mahasiswa daerah 4. Pemantapan rasa					2 kali 3 kali 3 kali 2 kali	344.716.500	2 kali 3 kali 3 kali 2 kali	318.290.135,00	100%	92,33%				

	nasionalisme bagi ormas/LSM																		
	5. Peningkatan cinta tanah air bagi kelompok pelajar luar sekolah se-Kota Yogyakarta					1 kali		1 kali											
	6. Peringatan Serangan Umum 1 Maret					2 kegiatan		2 kegiatan											
	7. Penguatan komunitas intelegen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta					24 kali		24 kali											
	8. Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta					10 kali		10 kali											
	9. Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta					4 kali		4 kali											
	10. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di					2 kali		2 kali											
						1 kali		1 kali											

	wilayah 11. Pemantapan rasa nasionalism e bagi ASN														
2.19.01.090.002	Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kmasayarakatan 1. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol 2. Monitoring kegiatan Pemilukada tahun 2017 3. Penelitian lapangan dan pengeluaran SKT bagi Ormas di Kota Yogyakarta 4. Bimbingan teknis bagi parpol penerima bantuan keuangan					6 kali		6 kali							
						3 bulan	63.884.500,00	3 bulan	61.982.500,00	100%	97,02%				
						12 kali		12 kali							
						1 kali		1 kali							
2.19.01.090.003	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi						288.743.664,0 0		279.209.688,7 2	100%	96,70%				
						1 kali		1 kali							

	<p>1. Pemantapan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta</p> <p>2. Pemantapan forum kerukunan antar ummat beragama (FKUB) Kota Yogyakarta</p> <p>3. Pemantapan forum pembauran kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta</p> <p>4. Pemantapan forum P4GN dan penyalahgunaan NAPZA</p>					7 kali		7 kali							
2.19.01.088	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Presentase organisasi ber-SKT yang aktif										79%	79%	100%	
2.19.01.088.001	<p>Pemantapan Wawasan Kebangsaan</p> <p>1. Sosialisasi cinta tanah air bagi</p>											10 kali	10 kali	100%	

	<p>pelajar dan masyarakat</p> <p>2. Perangan Serangan Umum 1 Maret</p> <p>3. Penguatan komunitas intelegen daerah</p> <p>(KOMINDA) Kota Yogyakarta</p> <p>4. Penguatan forum</p> <p>kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta</p> <p>5. Penguatan tim perpadu penanganan konflik sosial kota Yogyakarta</p> <p>6. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah</p> <p>7. Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol</p>											1 kali	1 kali		
												36 kali	36 kali		
												6 kali	6 kali		
												6 kali	6 kali		
												2 kali	2 kali		
												3 kali	3 kali		
												6 kali	6 kali		

	8. Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta 9. Penguatan ormas di Kota Yogyakarta 10. Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat 11. Penguatan antar forum yang ada di kota Yogyakarta										12 kali	12 kali		
											1 kali	1 kali		
											25 kali	25 kali		

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh perangkat daerah. Adapun hasil analisa kinerja pelayanan SKPD adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2	Program Nasional (yang melekat di Kementrian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh PD Keseuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq kementrian / LPNK	7 program -	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	10 kali 5 kali 5 program 14 SOP	5 program 14 SOP	5 program 14 SOP	5 program 14 SOP	10 kali 5 kali 5 program 14 SOP	- -	5 program 15SOP	5 program 16 SOP	

3	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan	-	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	-	1 buah	1 buah	
4	PD menurut Permen	-		3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	-	3 jabatan	3 jabatan	
5				-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pengisian struktur jabatan	-		0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	-	0,18%	0,18%	
7	Tugas kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait		Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah Rasio PNS Kota									
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9	Kelengkapan dokumen perencanaan	-	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	

	pembangunan yang dimiliki oleh PD		Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA PD									
10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD	-	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
11	Sinkronisasi program RKA PD dengan program Renja PD		Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12	Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	-	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
13	Alokasi anggaran	-	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	-	0,001%	0,001%	
14	Besaran belanja modal	-	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	-	0,63%	0,63%	
15	Besaran belanja pemeliharaan	-	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	-	11,57%	11,57%	

16			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	2,30%	2,30%	
17	Laporan keuangan PD	-	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	-	6 jenis	6 jenis	
18	Manajemen aset PD	-	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	
19	Penggunaan aset PD	-	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	
20	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	-	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	-	4 jenis	4 jenis	
21	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	-	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	77,40	77,40	77,40	77,40	77,40	-	77,40	77,40	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan Kantor Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 ten

tang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009. Namun demikian dengan berlakunya kelembagaan baru sementara Kantor Kesatuan Bangsa masih dibiarkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari 1 Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan ditunjang oleh Sub Bag Tata Usaha sebagai Sekretariat PD melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari proses yang berkesinambungan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dan tingkat kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma PD.

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD dan Tindaklanjutnya

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya kesesuaian antara pencairan dana dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan / program.
2. Dengan tidak adanya kesesuaian antara pencairan dana tersebut diatas maka pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan tidak sesuai dengan jadwal semula.
3. Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal
4. Keterbatasan SDM sehingga menghambat proses ketugasan, SDM yang ada belum sebanding dengan beban tugas.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di PD.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian sesuai visi Walikota Yogyakarta Walikota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah ingin mewujudkan “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.
- c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Kantor Kesatuan Bangsa untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa, generasi muda dan olah raga
- e) Adanya sarana dan prasarana

2) Kelemahan

- a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di SKPD
- c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- d) Data yang ada kurang lengkap.

2. Faktor eksternal

1) Peluang

- a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
- b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada dimasyarakat
- d) Kesiediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana
- e) Tersedianya pedoman untuk acuan

- 2) Ancaman
 - a) Adanya potensi terjadinya konflik
 - b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi
 - c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor .
2.2	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional .
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur .
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.1	Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor .
2.2	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional .

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum didalam RPJMD dilaksanakan sesuai dengan analisa kebutuhan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 seperti tertuang dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Pengembangan Wawasan	Kota Yogyakarta			1.524.619.780,-	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta			1.524.619.780,-	
1.1.	Kebangsaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan		1. Frekuensi Pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat 2. Peringatan Hari Perjuangan Nasional Kota Yogya 3. Frekuensi Koordinasi Komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta) 4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	10 kali 3 kali 36 kali 6 kali				1. Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat 2. Peringatan Hari Perjuangan Nasional Kota Yogya 3. Frekuensi Koordinasi Komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta) 4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan	10 kali 3 kali 36 kali 6 kali		

			(FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali				dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali		
			5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	2 kali				5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	2 kali		
			6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	3 kali				6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	3 kali		
			7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	6 kali				7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	6 kali		
			8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta	12 kali				8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta	12 kali		
			9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	1 kali				9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	1 kali		
			10. Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan					10. Frekuensi Sarasehan bagi			

			<p>pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta</p> <p>11. Frekuensi Penguatan Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta</p> <p>12. Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019</p>	<p>25 kali</p> <p>12 bulan</p>				<p>penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta</p> <p>11. Frekuensi Penguatan Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta</p> <p>12. Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019</p>	<p>25 kali</p> <p>12 bulan</p>		
--	--	--	---	--------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kota Yogyakarta yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
(Melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD)
Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 hanya melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah :

1. Melaksanakan ketugasan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkeadilan dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau menurunkannya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tercantum dalam PP 38 tahun 2007 dimana kebijakan itu mencakup 3 hal yaitu :

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Kewaspadaan Nasional
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
4. Politik Dalam Negeri
5. Ketahanan Ekonomi

Namun demikian dengan munculnya UU 34 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal sebagaimana diatur dalam PP 38 tahun 2007 masuk dalam urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan yang berada di bawah presiden artinya menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara dalam PP 18 tahun 2016 yang menjadi acuan pelaksanaan UU 34 tahun 2014 urusan kesatuan bangsa “dibiarkan” sampai ada aturan lebih lanjut. Hal inilah yang menjadikan keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menjadi gamang. Itulah sebabnya Kantor Kesatuan Bangsa tetap melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PP 38 tahun 2007 meskipun dalam skala minimal pada tahun 2018 tetap melaksanakan **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan.**

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta 1917 – 1922, maka tujuan dan sasaran semua perangkat daerah haruslah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rentrsa Kantor Kesatuan Bangsa adalah **Meningkatkan Kondusifitas Daerah**. Sedangkan sasarannya adalah **Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat**.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa untuk tahun 2019 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018. Kesenambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta bukanlah sebuah struktur yang ideal dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Menjaga kondusifitas daerah
3. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa

Jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 adalah sebanyak 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran tahun 2019

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Pagu Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Yogyakarta	661.423.342,00
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Yogyakarta	404.320.000,000
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta	232.449.195,00
1.3.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kota Yogyakarta	24.654.147,00
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kota Yogyakarta	64.138.400,00
2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Yogyakarta	15.000.000,00
2.2.	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Yogyakarta	50.612.552,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Yogyakarta	6.000.000,00
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kota Yogyakarta	6.000.000,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kota Yogyakarta	5.000.000,00
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Yogyakarta	5.000.000,00
5.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	1.524.619.780,00
5.1	Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	1.524.619.780,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019**

Kantor Kesatuan Bangsa

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					658,132,492	677,876,468		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kantor Kesatuan Bangsa			Makan minum yang tersedia untuk pegawai	11 orang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik		365,555,950	376,522,629	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali						
							Makan minum yang tersedia untuk tamu	24 kali						
							Laporan hasil	15						

							koordinasi dan konsultasi luar daerah	laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Kesatuan Bangsa			Materi 6000 yang tersedia	75 lembar	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	267,922,395	275,960,067	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Materi 3000 yang tersedia	250 lembar						
							STNK roda 4 yang terbayar	2 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	2 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	53 jenis						
							Jasa percetakan	1 jenis						
							Jasa penggandaan	135.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 jenis						
							Komponen printer	8 jenis						

							yang tersedia							
							Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan kerja	12 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kantor Kesatuan Bangsa			Jasa Tenaga Bantuan	1 Orang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	24,654,147	25,393,772	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					64,138,400	66,062,552		
2.1	Pemeliharaan			Kantor			Jasa pemeliharaan	1 lokasi	Terwujudnya	100%	15,000,000	15,450,000	sedang	Kantor

	Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kesatuan Bangsa			gedung bangunan pemerintah		sarana dan prasarana aparatur				berjalan	Kesatuan Bangsa
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Kesatuan Bangsa			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4	2 unit	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	49,138,400	50,612,552	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2	2 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					6,000,000	6,180,000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kantor Kesatuan Bangsa			Jumlah diklat formal yang diikuti	2 jenis	SDM aparatur meningkat	100%	6,000,000	6,180,000	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					10,000,000	10,300,000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat			Kantor Kesatuan Bangsa			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	7 dokumen	Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat	100%	10,000,000	10,300,000	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa

	Daerah						SKPD (RENSTRA,RENJA, RKA/DPA, LKIP, PK, Laporan Keuangan								
							Pembuatan Profil OPD	500 buah							
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyeles aian konflik sosial dimasyar akat meningka t		Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	80%					2,431,456,380	2,504,400,072			
5.1	Pemantapan Wawasan Kebangsaan			Kota Yogyakarta			Pemantapan rasa cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	10 kali	Rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dimasyarakat sebagai pengendali konflik sesuai standar politik yang konduusif didaerah sesuai standar ketahanan nasional disemua bidang sesuai standar	80%	2,431,456,380	2,504,400,072	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa	
							Peringatan hari	3 kali							

							sejarah perjuangan kota yogya							
							Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	36 kali						
							Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali						
							Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	6 kali						
							Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali						
							Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	3 kali						
							Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali						
							Penguatan ormas dikota Yogyakarta	12 kali						

							Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawsan aliran kepercayaan masyarakat	1 kali						
							Penguatan antar forum yang ada dikota Yogyakarta	25 kali						
							Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	12 bulan						
Total												3,169,727,272	3,264,819,092	

BAB V

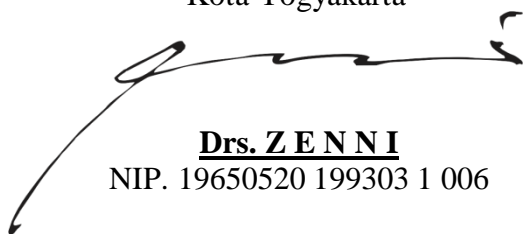
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Awal RKPD Tahun 2019 yang mengacu RPJMD Kota Yogyakarta. Penyusunan Renja Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk kurun waktu 2017 – 2022 sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta memuat Program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019.

Yogyakarta, Juli 2018
Plt. Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta



Drs. ZENNI
NIP. 19650520 199303 1 006